

Persepsi Dan Strategi Pengelolaan HKM Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba (Studi Kasus KPHP, Sintuwu Maroso Kabupaten Poso)

Daniel Surya Krisna¹, Hj. Wardah dan Muhandi²

danitabunggi01@gmail.com

¹(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian. Pascasarjana Universitas Tadulako)

²(Dosen Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian. Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The aims of this research are to find out (1) community perception in implementation of social forestry; (2) strategy in social forestry development in Leboni village. This research was a descriptive study. The respondents determined by using purposive sampling technique. The data were analysed by using descriptive analysis and supported by Likert Scale, SWOT Matrix, Quantitative Strategy Planning Matrix. The result reveal that the perception about quality value indicator is Good (average score 70,0), emotional value indicator is Good (average score 87,0), fungsional value indicator is Very Good (average score 104,0), and generally perception is Good (average of score total 72,8). Five alternative of strategies that could be applied, they are : (1) develop forest farmer group to be business unit; (2) Implement Good Agriculture Practise; (3) making network with private, local government and local custom institution; (4) increasing regency government support for facilities and infrastructure; (5) develop local wisdom technique in forest management. The priority strategy is develop forest farmer group to be business unit (Score 5,7041)

Keywords: *Perception, Strategy, SWOT, QSPM*

Indonesia seperti halnya yang dialami oleh negara-negara lain, saat ini tengah mengalami krisis menurunnya jumlah areal hutan (*deforestasi*) akibat dari meningkatnya intensitas penebangan kayu untuk keperluan rumah tangga dan industri serta konversi areal hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Laju *deforestasi* yang sangat mencengangkan pada setiap dekade pada dasarnya merupakan dampak dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat pada 10 tahun terakhir. Sumargo, *et al* (2011), mengungkapkan bahwa laju *deforestasi* di Indonesia pada periode tahun 2000-2009 sebesar 1,51 juta ha/tahun, menempatkan Indonesia termasuk negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca (*green house effect*) menyebabkan terjadinya pemanasan global (*global warming*). Pemanasan bumi yang bersifat menyeluruh tersebut menjadi salah satu penyebab pergeseran iklim dengan

musim hujan dan kemarau yang lebih panjang dari biasanya (*La-nina dan El-nino*) (Hardiatmi, 2008).

Wilayah Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba termasuk kategori Blok Pemberdayaan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sintuwu Maroso Kabupaten Poso yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2011. Program yang dikembangkan di wilayah ini adalah Program HKM. Hasil observasi pendahuluan terhadap program HKM di Desa Leboni menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang muncul. Secara umum, KPH merupakan kebijakan yang terbukti dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satunya melalui pengembangan program Hutan Kemasyarakatan (HKM). Sesuai dengan peraturan pemerintah, maka program HKM harus melibatkan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan lahan dan

pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan hutan lindung. Kelompok masyarakat diorganisir secara formal melalui wadah kelompok tani hutan, yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari, sekaligus dapat menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial.

Penelitian Suryandari *et al.*, (2009) dalam Suryandari dan Alviyah (2009) dan Aji, *et al* (2010) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya program HKm telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, tetapi perlu terus dilakukan penataan pada aspek sosial-ekonomi dan kelembagaan meliputi paradigma, akses dan kontrol, pelibatan penuh masyarakat dalam konteks pemberdayaan serta perbaikan kelembagaan.

Salah satu prinsip dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 adalah fasilitasi kelompok. Hal ini berarti bahwa kelompok Tani Hutan Lempe Jaya memperoleh jaminan keterlibatan dan partisipasi penuh dalam pengembangan organisasi. Permasalahannya adalah Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya yang mengembangkan tanaman Karet sebagai komoditi unggulan, menghadapi kendala secara internal organisasi yaitu kapasitas organisasi yang lemah, dan pada aspek lain secara eksternal terjadi perubahan-perubahan maupun kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi kinerja organisasi. Berdasarkan kondisi ini, diperlukan strategi pengembangan yang dapat diterapkan oleh kelompok agar mampu mencapai tujuan program HKm secara ekologi dan ekonomi.

Oleh karena itu, maka dalam pembinaan kawasan hutan, menurut Murdianto (2008) diperlukan suatu strategi kebijakan yang berbasis pada konsep lokalitas untuk memahami masyarakat sekitar yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, karena hutan merupakan

rumah bagi mereka dan bukan sekedar tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Supratman (2007), menegaskan bahwa KPH perlu didesain sedemikian rupa sesuai situasi lapangan sehingga pembangunan KPH dapat menjadi kondisi pemungkin (*enabling conditions*) dicapainya pengelolaan hutan secara berkelanjutan

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Persepsi dan Strategi Pengembangan KPHP Sintuwu Maroso Kabupaten Poso, dengan mengambil studi kasus di Blok Pemberdayaan Program HKm Desa Leboni, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Persepsi dan harapan masyarakat terhadap implementasi program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso; 2). Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso.

METODE

Jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Leboni, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2014. Populasi penelitian adalah Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sebanyak 30 orang. Selain itu ditentukan pula informan kunci (*key informan*) yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan tiga orang anggota Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya, tokoh masyarakat, tokoh adat, penyuluh kehutanan, Kepala Desa Tonusu. Data terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara mendalam (*Depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi.

Data dianalisis menggunakan metode *descriptive analysis* yang dibantu *skala Likert* untuk mengukur persepsi responden serta *External Factor Evaluation Matrix*, *Internal Factor Evaluation Matrix*, *SWOT Matrix*, *Internal-External Matrix* dan *Quantitative Strategy Planning Matrix* untuk merumuskan strategi pengembangan program HKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presepsi Responden Terhadap Program HKM

Hasil pengukuran persepsi responden terhadap program HKM yang disusun berdasarkan indikator nilai kualitas, nilai emosional, dan nilai fungsional disusun ke dalam Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi persepsi responden terhadap Program HKM

Pernyataan	Frekwensi				N	Skor	Kategori Persepsi
	1	2	3	4			
Nilai kualitas							
Pengurus kelompok mampu mengatur kelompok	7	10	11	2	30	68	Baik
Anggota kelompok terlibat aktif di setiap kegiatan	10	12	2	6	30	64	Tidak Baik
Tersedia sarana yang menunjang penyelesaian setiap tahapan kegiatan	6	8	12	4	30	74	Baik
Tahapan pekerjaan telah direncanakan dengan matang	6	8	12	4	30	74	Baik
Sub Total						280	
Rata-rata						70	Baik
Nilai Emosional							
Saya senang karena terlibat melestarikan fungsi hutan	7	1	10	12	30	87	Baik
Saya merasa senang bekerja sebab ada aturan yang diakui pemerintah	4	6	3	17	30	93	Sangat Baik
Saya senang bekerja dalam kelompok	2	1	14	13	30	98	Sangat Baik
Saya merasa senang karena saya selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan	6	13	6	5	30	70	Baik
Sub Total						348	
Rata-rata						87	Baik
Nilai Fungsional							
Program ini dapat mengurangi luas hutan yang rusak	4	1	2	23	30	104	Sangat Baik
Program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	7	5	7	11	30	82	Baik
Pengalaman dan pengetahuan bertambah dengan adanya pelatihan/penyuluhan	17	1	7	5	30	60	Tidak Baik
Sub Total						246	
Rata - rata						82	Baik
Total						874	
Rata-rata						72.8	Baik

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil pengukuran persepsi dari indikator nilai kualitas, nilai emosional dan nilai fungsional adalah 72,8, dan nilai tersebut termasuk di dalam kategori sikap Baik. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum responden menganggap baik tentang keterlibatan dan aktivitas yang mereka lakukan di dalam program Hutan Kemasyarakatan. Keinginan, kebutuhan dan harapan responden sesuai dengan konteks latar belakang kehidupan mereka yang selalu bersentuhan dengan kawasan hutan, dianggap telah dipenuhi oleh Program Hutan Kemasyarakatan, sehingga mereka cenderung menginterpretasikan makna program ini dengan baik.

a. Indikator Nilai Kualitas

Tabel 2 tentang indikator nilai kualitas program HKM, menunjukkan terdapat tiga item pernyataan yang dipersepsikan Baik oleh responden, yaitu kemampuan pengurus mengatur kelompok dengan skor 68, ketersediaan sarana atau fasilitas kegiatan dengan skor 74 dan perencanaan pekerjaan memperoleh skor 74.

Berdasarkan ketiga item pernyataan tersebut, berarti bahwa pengurus telah menunjukkan kinerja yang baik dari segi pembagian tugas dan wewenang pengurus, penguatan aturan dan tata tertib yang telah disepakati, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan KPHP dan pihak-pihak lain yang sangat berkepentingan dengan program ini. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai turut memperlancar pelaksanaan kegiatan baik administrasi, keuangan maupun aktivitas lapangan. Sistem kerja yang diterapkan oleh KTH Lempe Jaya adalah menyusun perencanaan yang matang, terarah dan terukur sehingga segala sumberdaya kelompok dapat dioptimalkan pemanfaatannya ke dalam setiap tahapan pekerjaan.

Item pernyataan yang dipersepsikan Tidak Baik dengan skor 64 oleh responden

dalam indikator kualitas program adalah keaktifan anggota dalam setiap kegiatan. Frekwensi ketidakhadiran anggota bervariasi antar anggota, dalam arti bahwa setiap anggota sebenarnya berkeinginan untuk hadir di setiap aktivitas kelompok namun terkendala pada berbagai macam kepentingan ataupun keperluan rumah tangga yang sifatnya mendesak.

Secara keseluruhan, responden memberikan persepsi Baik dengan rata-rata skor 70,0 mengenai indikator nilai kualitas. Pada dasarnya, kemampuan pengurus mengatur kelompok, ketersediaan sarana atau fasilitas kegiatan dan perencanaan pekerjaan merupakan unsur pokok dalam penatalayanan kelembagaan yang sangat menentukan terwujudnya kualitas program.

b. Indikator Nilai Emosional

Persepsi yang Baik (Skor 87) diberikan oleh responden sebab program ini memberikan mereka peluang dalam keterlibatan mereka dalam perlindungan kawasan hutan. Persepsi yang Sangat Baik dengan skor 93 juga ditunjukkan responden terhadap pernyataan adanya perlindungan pemerintah dalam bentuk peraturan pengelolaan hutan. Responden menunjukkan persepsi yang Baik dengan skor 98 mengenai kerjasama di dalam kelompok, sebab pada dasarnya komunitas masyarakat setempat adalah individu-individu yang selalu terikat pada nilai-nilai sosial antara lain sifat gotong royong dan musyawarah. Hal ini pula yang menyebabkan mereka memberikan persepsi yang Baik dengan skor 70 mengenai keterlibatan mereka secara partisipatif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan hutan disebabkan kedekatan mereka dengan kawasan hutan selama ini.

Rata-rata skor indikator nilai emosional adalah 87 yang menunjukkan bahwa pada umumnya responden memberikan persepsi yang Baik, sebab responden yang selama ini selalu bergantung pada hasil hutan merasa bahwa hak-hak mereka diakomodir

sepenuhnya ke dalam program ini walaupun tetap harus berpatokan pada batasan-batasan aturan pengelolaan namun telah membuat mereka secara emosional tetap memiliki kawasan hutan.

c. Indikator Nilai Fungsional

Hasil pengukuran persepsi responden terhadap nilai fungsional program Hutan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi yang Sangat Baik (Skor 104) terhadap manfaat program HKM bagi pelestarian hutan, sebab keberadaan hutan dengan segala sumberdayanya adalah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat lokal. Responden memberikan persepsi yang Sangat Baik dengan skor 98 terhadap pernyataan adanya tambahan pendapatan rumah tangga melalui program HKM, dimana hal ini sangat berkaitan erat dengan harapan dan kebutuhan rumah tangga petani responden yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

Sebaliknya responden memberikan persepsi Tidak Baik (Skor 60) terhadap item pelatihan atau penyuluhan, disebabkan sistem pelatihan ataupun penyuluhan belum dilakukan secara terstruktur dalam perencanaan jangka panjang sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok mengenai kelembagaan, inovasi teknis budidaya, penanganan pasca panen hingga pemasaran.

Analisis Lingkungan Internal

a. Sumber Daya Lahan

Areal kerja HKM yang ditetapkan sebagai blok pemberdayaan di dalam kawasan hutan lindung Maranjongi seluas 80 ha, sesuai keputusan KPHP Model Sintuwu Maroso, disesuaikan dengan titik-titik perambahan hutan yang bisa terdeteksi dan dikategorikan dapat merusak fungsi hutan dalam jangka panjang. Areal kerja HKM Desa Leboni ditunjang oleh kondisi biofisik wilayah yang sesuai dengan persyaratan

tumbuh tanaman Karet yaitu suhu udara antara 24-28 derajat C, kelembaban tinggi, curah hujan antara optimal 1.500-2.000 mm/tahun, lama penyinaran matahari antara 5-7 jam/hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa 80 % areal kerja blok pemberdayaan HKM Desa Leboni memiliki kondisi topografi yang landai dan 20 % bergelombang, sehingga sangat memudahkan kegiatan penataan lahan budidaya tanaman Karet dan dapat meminimalisir perlakuan pengolahan tanah berat seperti pembuatan teras sering. Selain itu, keragaman *biodeversity* hutan sekitar blok pemberdayaan dapat membuka peluang dilakukannya identifikasi potensi sumberdaya hutan yang tersedia untuk memberdayakan masyarakat tanpa harus melakukan penebangan pohon.

b. Sumber Daya Manusia

Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya memiliki sumber daya manusia yang umumnya berpendidikan formal tamat sekolah dasar sebanyak 66%, tingkat pendidikan pertama 30,18%, dan tingkat pendidikan menengah 3,77%. Pemahaman yang baik tentang arti dan manfaat program HKM sangat dibatasi oleh faktor tingkat pendidikan anggota KTH Lempe Jaya yang sebagian besar berpendidikan SD dan SMP. Walaupun tingkat pendidikan yang rendah tidak menyurutkan niat yang tercermin dari minat dan partisipasi anggota yang tinggi, namun tetap saja faktor pengetahuan memperlihatkan sifat anggota yang tidak berdaya terhadap sumberdaya produksi, tidak mandiri dalam pengambilan keputusan dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan pihak luar. Pengetahuan yang cukup komprehensif melalui pelatihan-pelatihan, khususnya mengenai pemasaran dan kemitraan, belum dapat mendorong adanya bentuk kemitraan yang coba dibangun oleh pengurus, malah mereka justru berkuat dengan aktivitas teknis budidaya. Perilaku ini merupakan ciri khas petani yang selalu

menginginkan imbalan tunai secara cepat dalam bentuk hasil produksi, tetapi di sisi lain faktor perilaku ini juga akan sangat menghambat upaya bersama di dalam kelompok mengembangkan ide kreatif sebagai solusi perbaikan dan penguatan kelembagaan kelompok tani hutan

c. Modal

Pembiayaan program untuk saat ini masih mengandalkan subsidi dari KPHP Unit XI Sintuwu Maroso yang dialokasikan untuk ongkos kerja dan tempat pembuatan tempat pesemaian dan pembibitan serta biaya pemeliharaan. Dukungan pembiayaan ini sudah sangat baik, sebab dapat membantu memperpanjang kinerja KTH pada tahap awal program, tetapi apabila subsidi ini tidak diikuti dengan proses pemupukan modal mandiri oleh KTH, akan menyebabkan tingginya ketergantungan mereka terhadap subsidi dalam jangka panjang dan bisa menjadi kendala dalam keberlanjutan implementasi program.

d. Proses

Program HKm di Desa Leboni dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan yang bernama Lempe Jaya dengan jumlah anggota sebanyak 53 orang adalah masyarakat yang pernah atau sedang mengolah lahan di dalam kawasan hutan lindung Maranjongi. Surat perjanjian Kerjasama antara KTH Lempe Jaya dengan KPHP Sintuwu Maroso No.01/SPKS-PW/KPPPHM-SM/2014 tanggal 6 Januari 2014, merupakan landasan kerja secara formal dimana terdapat beberapa unsur penting sebagai prinsip kerja dalam pengelolaan HKm Desa Leboni, yaitu adanya SPKS bagi KTH Lempe Jaya untuk mengelola lahan seluas 80 ha di dalam kawasan hutan lindung, Rencana Umum sebagai pedoman target kerja, dan Rencana Operasional.

Musyawarah anggota kelompok yang difasilitasi oleh KPHP Unit XI Sintuwu

Maroso menetapkan bahwa jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman Karet, dan areal seluas 80 ha dibagikan secara merata kepada anggota Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya yang berjumlah 53 orang sehingga masing-masing anggota berhak mengelola areal kerja seluas kurang lebih 1,5 ha.

Pengurus dan anggota KTH Lempe Jaya menetapkan hari jumat setiap minggu sebagai jadwal pertemuan rutin di lokasi HKM sebagai sarana perencanaan kegiatan tahapan berikutnya dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. KPHP Unit XI Sintuwu Maroso menyiapkan seluruh sarana penunjang kegiatan kelompok berupa bibit tanaman Karet sejumlah 27.500 pohon termasuk cadangan, perlengkapan tempat pembibitan, pupuk, obat pengendali gulma dan hama, *spayer*, *net screen*.

Pada aspek prasarana, penataan *lay out* areal lahan yang belum rampung menyebabkan aksesibilitas dalam kawasan pemberdayaan hanya menggunakan jalan setapak, namun terdapat jaringan jalan yang baik menghubungkan antara kawasan pemberdayaan dengan Desa Leboni dan ibu kota Kecamatan Pamona Puselemba.

Kinerja KTH Lempe Jaya didukung oleh seorang fasilitator yang biasanya disebut "mandor" yang secara kelembagaan bertindak sebagai tenaga bantuan teknis dari KPHP Unit XI Sintuwu Maroso. Tugas fasilitator adalah mendampingi kegiatan-kegiatan KTH Lempe Jaya serta mengkoordinasikan kebijakan pengelola KPHP Sintuwu Maroso.

Proses belajar bersama merupakan unsur penting guna mendukung pengembangan program HKm sebab banyak pengalaman praksis yang sangat kaya dan perlu dipelajari oleh peserta program dan pengambil kebijakan. Secara spesifik, kesadaran anggota KTH Lempe Jaya yang direfleksikan melalui keaktifan dan partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan kelompok dan mengikuti petunjuk fasilitator program merupakan cerminan dari persepsi

masyarakat terhadap hutan yang sejak dahulu telah memiliki ikatan kultural secara budaya dan geografis dengan kawasan hutan.

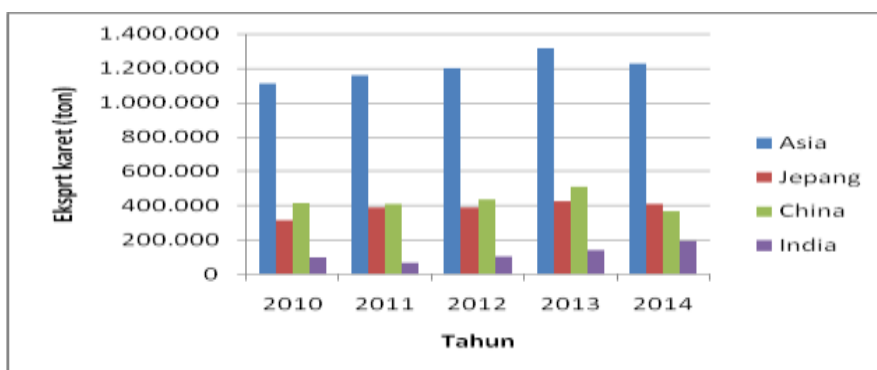
Analisis Lingkungan Eksternal

a. Aspek Ekonomi

Bila didasarkan pada industri otomotif, maka peningkatan volume penjualan otomotif secara linear meningkatkan konsumsi karet alam. Berdasarkan data *Commodities Insight* (2013), konsumsi karet

alam global tahun 2013 diperkirakan mencapai 11,6 juta ton atau tumbuh 4%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2,4%. Pertumbuhan konsumsi tersebut masih berasal dari pertumbuhan sektor otomotif terutama di Cina, kawasan Asia dan Amerika Serikat.

Volume permintaan karet alam dapat diinterpretasi dari volume ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Volume ekspor karet alam Indonesia, 2010-2014

Gambar 1 menunjukkan kenaikan permintaan atau konsumsi karet alam dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia berdasarkan data selama 5 tahun.

Apabila diperbandingkan antara volume ekspor dengan jumlah total produksi dalam negeri, maka sebagian hasil produksi karet alam digunakan oleh industri ban otomotif dalam negeri, dimana industri otomotif menunjukkan tanda peningkatan permintaan yang tinggi pula. Sebaliknya, karena karet alam merupakan komoditi yang diperdagangkan di pasar dunia maka harga karet domestik akan sangat dipengaruhi oleh harga karet global. Ketika pasokan karet dari Indonesia, Malaysia dan Thailand melebihi serapan konsumsi pasar global maka harganya akan turun.

Berdasarkan data harga karet alam yang dipublikasikan oleh detikfinance.com (2014), pada kuartal pertama tahun 2014, harga karet di tingkat petani merosot tajam hingga Rp. 6.500/kg, bila dibandingkan

dengan harga pada akhir tahun 2013 sebesar Rp. 8.000/kg. Fluktuasi harga juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh penggunaan karet sintesis. Polimer karet dapat diperoleh dari dua sumber, karet alam dan karet sintetik. Adapun karet sintesis diperoleh dari polimerasi yang berbahan baku minyak bumi, dimana hampir 60 % kebutuhan karet dunia disuplai dari karet sintesis, oleh sebab itu harga minyak mentah secara tidak langsung akan mempengaruhi harga karet alam. Jika harga minyak mentah meningkat tajam, maka konsumen karet lebih memilih karet alam yang harganya lebih murah dibandingkan dengan memproses minyak bumi menjadi karet sintesis yang harganya mahal. Pada saat kondisi ini terjadi maka harga karet akan cenderung mengalami kenaikan per kilogramnya.

b. Aspek Politik

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso 2010 -

2015, pemerintah daerah menetapkan strategi pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif melalui program revitalisasi pertanian, peningkatan investasi dan ekspor non-migas serta peningkatan iklim investasi penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan sistem pendukung UMKM serta penataan regulasi agar dapat menciptakan iklim investasi yang baik.

Pemerintah membuat kebijakan dan peraturan yang mengarah kepada upaya perbaikan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan milik negara dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKM) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutan No. 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang menekankan bahwa hasil hutan dari hutan kemasyarakatan adalah komoditi hasil hutan bukan kayu.

Keputusan ini kemudian diperbaiki dengan SK Menteri No. 677/Kpts-II/1998. Prinsip dari keputusan ini adalah masyarakat bisa mengambil keputusan pengelolaan hutan dalam bentuk koperasi dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Keputusan ini diperbaiki dengan SK No. 865/Kpts-II/1999 yang melonggarkan aturan pengelolaan hutan oleh masyarakat dimana pengelolaan tidak harus melalui koperasi tetapi bisa dalam bentuk kelompok apa saja serta ijin perusahaan dirubah menjadi ijin pemanfaatan.

Kebijakan pemerintah secara nasional tentang pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat diperkuat melalui penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 23 menyebutkan "pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka untuk mendorong percepatan perbaikan kondisi biofisik hutan yang semakin parah, maka pemerintah pusat

memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberi ijin dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat melalui SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/Menhut-II/2007 yang mengatur khusus tentang Hutan Kemasyarakatan (HKM) memberi dorongan perkembangan yang sangat baik bagi pengelolaan Hutan kemasyarakatan, sebagaimana tercantum pada pasal 3 bahwa "penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat", serta pasal 4 menyebutkan "hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup".

Pembentukan kelembagaan KPHP Sintuwu Maroso Kabupaten Poso pada tahun 2011 merupakan langkah maju bagi penataan kebijakan pelestarian hutan dengan menetapkan luas areal KPHP Unit XI Sintuwu Maroso Kabupaten Poso menggunakan peta hasil tata batas dari BPKH wilayah XVI Palu adalah 130.477,62 ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 42.273,36 ha dan Hutan Produksi (HPT dan HP) seluas 88.204,26 Ha.

Solusi penanggulangan *deforestasi* yang selama ini cenderung bersifat praktis melalui pengawasan Polisi Hutan, kini lebih humanis dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

c. Aspek Sosial-budaya

Penduduk Desa Leboni adalah komunitas yang tidak dapat dipisahkan dengan kawasan hutan seperti lazimnya

masyarakat Indonesia. Hutan menjadi sumber kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain budidaya padi sawah.

Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat kebiasaan atau adat istiadat masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih melekat pada perilaku masyarakat dalam pemanfaatan hutan adalah penetapan waktu untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan bulan purnama, misalnya penebangan kayu untuk bahan bangunan rumah harus dilakukan pada saat “bulan mati” agar kayu yang digunakan tahan lama dan tidak rapuh dimakan rayap, serta kayu tersebut berasal dari pohon yang dipilih dengan teliti baik jenis, bentuk maupun letak kayu di dalam hutan. Metode ini sangat efektif mengendalikan kegiatan penebangan hutan yang di lakukan secara serampangan.

Tetapi seiring dengan terjadinya perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, turut mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan atau perilaku adat masyarakat Desa Leboni dalam pemanfaatan hutan, sebagian masyarakat khususnya penduduk yang berumur muda, tidak lagi mengindahkan syarat-syarat dan kebiasaan adat setempat dalam pemanfaatan hutan, tetapi lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan pribadi yang cenderung meningkatkan aktivitas pembalakan liar. Hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan mendorong terjadinya perubahan sosial yang berlangsung sepanjang masa di dalam masyarakat.

Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor antara lain sistem komunikasi masyarakat yang semakin berkembang, perubahan jumlah penduduk, pendidikan yang semakin tinggi, perkembangan teknologi, maupun faktor lain seperti terjadinya konflik, bencana alam, perubahan iklim, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

d. Teknologi

Proses adaptasi manusia melalui pengetahuan yang dimiliki memicu terciptanya beragam teknologi yang dapat digunakan, oleh karena itu kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Informasi dan komunikasi antara pengurus dengan anggota kelompok maupun antara pengurus dengan pengelola KPHP menjadi sangat baik. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok di lapangan dapat langsung diinformasikan kepada petugas teknis, sehingga masalah dapat teratasi dengan cepat. Faktor ini turut mendorong perkembangan ekonomi wilayah dengan adanya pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat seperti tempat wisata, maupun sebagai jalur lintas perdagangan antar kecamatan di kawasan pesisir barat Danau Poso

Analisis SWOT

Faktor-faktor pengaruh strategis tersebut di atas diberi bobot dan rating seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Internal Factor Evaluation Matrix

Faktor pengaruh Internal	Bobot	Rating	Jumlah
Kekuatan :			
1. Areal kerja cukup luas (80 ha)	0,0769	3	0,2308
2. Manajemen kelompok baik	0,1709	4	0,6838
3. Potensi total produksi karet tinggi	0,1282	4	0,5128
4. Minat kelompok sangat baik	0,1624	3	0,4872
Total			1,9145
Kelemahan :			
1. Modal mandiri belum terbentuk	0,1453	1	0,1026
2. Tingkat pendidikan rendah	0,1026	1	0,2051
3. Sarana dan fasilitas kerja belum memadai	0,1026	2	0,2222
4. Akses pasar industri terbatas	0,1111	2	0,2308
Total			0,6752
Total Kekuatan - Total Kelemahan			1.2393

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 3. External Factor Evaluation Matrix

Faktor pengaruh eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang :			
1. Dukungan pemerintah pusat dan daerah	0,1200	4	0,4800
2. Meningkatnya konsumsi karet alam	0,2400	4	0,9600
3. Perkembangan teknologi dan informasi	0,1800	3	0,5400
Total			1,9800
Ancaman :			
1. Dominannya penggunaan karet sintesis	0,2200	2	0,2000
2. Terkikisnya prinsip kearifan lokal	0,1000	1	0,1400
3. Harga karet cenderung fluktuatif	0,1400	2	0,2800
Total			0,6200
Total Peluang - Total Ancaman			1,3600

Sumber: Data diolah, 2015

Posisi ini menunjukkan bahwa posisi KTH Lempe Jaya berada dalam kondisi organisasi yang kuat dan berpeluang sehingga strategi dasar yang paling tepat adalah strategi Progresif, artinya KTH Lempe Jaya sangat dimungkinkan untuk terus mengembangkan kapasitas organisasi untuk memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Sesuai dengan strategi dasar progresif yang telah diperoleh, maka rumusan kombinasi strategi sesuai dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Matris SWOT

Faktor Internl/Eksternal	Kekuatan : 1. Areal kerja cukup luas (80 ha) 2. Manajemen kelompok kuat 3. Potensi total produksi cukup tinggi 4. Minat kelompok sangat baik	Kelemahan : 1. Tingkat pendidikan rendah 2. Sarana dan fasilitas kerja tidak memadai 3. Modal mandiri belum terbentuk 4. Akses pasar industri terbatas
Peluang : 1. Dukungan pemerintah pusat dan daerah 2. Konsumsi karet alam meningkat 3. Perkembangan teknologi informasi	Strategi S-O : Mengembangkan status KTH menjadi badan usaha bisnis (S _{1,2,3,4} ;O _{1,2,3})	Strategi W-O Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar (W _{1,3,4} ; O _{1,3})
Ancaman : 1. Dominannya penggunaan karet sintetis 2. Terkikisnya kearifan lokal 3. Harga karet alam cenderung fluktuatif	Strategi S-T : 1. Mengembangkan teknis produksi yang berbasis <i>Good Agriculture Practice (GAP)</i> 2. Membangun kerjasama/kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah desa dan lembaga(S _{2,3,4} ; T _{1,2,3})	Strategi W-T : Mengembangkan teknik-teknik pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal (W _{1,2,3} ;T _{1,2,3})

Kombinasi S-O menghasilkan strategi mengembangkan status KTH menjadi badan usaha bisnis. Strategi ini menggunakan semua faktor kekuatan dan memanfaatkan seluruh peluang untuk mengembangkan kapasitas kelompok tani hutan dari unit produksi menjadi unit bisnis yang memiliki daya saing yang kuat untuk menjalin kemitraan dengan industri hilir maupun industri hulu, lembaga pembiayaan, ataupun lembaga penelitian

Kombinasi strategi S-T adalah: (1) Mengembangkan teknis produksi yang berbasis *Good Agriculture Practice (GAP)* agar dapat mempertahankan potensi produksi tanaman yang tinggi serta menghasilkan produk karet yang berkualitas sesuai dengan tuntutan mutu pasar industri; (2) Membangun kerjasama/kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah desa dan

Lembaga adat (*social institution*) agar dapat menjamin proses pemasaran yang menguntungkan, negosiasi harga sesuai kualitas produk dan tingkat permintaan serta meminimalkan intervensi pemilik modal terhadap sumberdaya hutan dan menjamin tercapainya pengelolaan hutan

yang berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan organisasi sebab kecenderungan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan sosial yang terjadi tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dan faktor ini tetap berdampak pada perilaku eksploitasi hutan.

Alternatif strategi kombinasi W-O adalah meningkatkan dukungan pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator dan regulator program pada aspek dukungan pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan, dan memfasilitasi terwujudnya hubungan kerjasama kelompok dengan pasar industri.

Kombinasi strategi W-T adalah mengembangkan teknik-teknik pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika eksternal yang tidak dapat di kendalikan, apalagi seperti kecenderungan perubahan sosial yang dialami masyarakat lokal akibat peningkatan pendidikan ataupun pertumbuhan ekonomi

Alternatif strategi kemudian disusun ke dalam *Quantitative Strategic Planning Method* untuk memperoleh prioritas strategi yang

dianggap paling menarik untuk dilakukan oleh KTH Lempe Jaya dalam pengembangan

program HKm Desa Leboni.

Tabel 5. Hasil analisis strategi prioritas

Alternatif Strategi	Nilai Total Atractiveness Score	Urutan Strategi
Mengembangkan KTH menjadi badan usaha bisnis	5,7096	I
Mengembangkan teknis produksi yang berbasis <i>Good Agriculture Practice (GAP)</i>	4,7412	IV
Membangun kerjasama/kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah desa dan lembaga adat	5,0552	III
Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana	5,1487	II
Menerapkan teknik-teknik pengelolaan sesuai dengan kearifan local	2,5824	V

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis QSPM, mengembangkan KTH menjadi lembaga bisnis adalah strategi yang dianggap paling menarik sebagai strategi prioritas dibandingkan dengan strategi lainnya sebab memiliki nilai *Total Atractiveness Score* (TAS) sebesar 5,7096. Strategi ini memiliki daya tarik faktor-faktor pengaruh internal yang tergolong sebagai kapasitas organisasi yaitu areal kerja seluas 80 ha, manajemen kelompok yang kuat, potensi produksi total tinggi, minat kelompok sangat tinggi serta faktor pengaruh eksternal yang memiliki pengaruh sangat positif terhadap tujuan Program Hutan Kemasyarakatan.

Keterkaitan Persepsi Masyarakat Dengan Strategi Pengembangan

Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan (Hakim, dkk, 2010). Oleh karena itu, menurut Limberg, dkk, (2006) kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat, terutama untuk menguraikan simpul

kemiskinan (*poverty*) masyarakat yang berdiam di sekitar dan atau di dalam kawasan hutan.

Pernyataan tersebut di atas sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Leboni yang sangat dilematis dan termarginalisasi berkaitan dengan pemanfaatan hutan, sebab selama ini mereka mengambil dan mengolah hasil hutan berdasarkan sistem nilai budaya lokal yang arif terhadap fungsi hutan, tetapi di sisi lain mereka harus diperhadapkan dengan pemilik modal yang memiliki akses penuh terhadap sumberdaya hutan serta peraturan pemerintah yang wajib mereka patuhi. Pada saat masyarakat Desa Leboni mengikuti Program Hutan Kemasyarakatan, segala aktivitas dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan telah membentuk sikap dan perilaku yang didorong oleh keyakinan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya mengolah areal hutan tanpa merusak fungsinya.

Hal inilah yang menyebabkan persepsi responden terhadap program Hutan Kemasyarakatan termasuk kategori **Baik (Skor 72,8)**. Persepsi masyarakat ini menjadi pintu masuk (*entry point*) yang sangat yang

baik bagi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan. Kesamaan cara pandang yang dicerminkan oleh sikap dan perilaku yang bernilai positif di tingkat Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya merupakan pondasi yang kuat dalam penerapan strategi pengembangan program Hutan Kemasyarakatan di Desa Leboni, sebab sebaik apapun strategi pengembangan yang dirumuskan dan diterapkan apabila tidak didasari oleh budaya dan perilaku organisasi yang relevan, maka tujuan tidak akan tercapai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya Desa Leboni memiliki persepsi yang baik dari segi kualitas, emosional dan fungsional mengenai Program Hutan Kemasyarakatan. Strategi dasar Kelompok Tani Hutan Lempe Jaya Desa Laboni adalah Strategi Progresif, dengan alternatif strategi yaitu:

- a. Mengembangkan status KTH menjadi badan usaha bisnis
- b. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah desa dan lembaga adat dalam rangka proteksi kawasan hutan
- c. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana
- d. Mengembangkan teknik-teknik pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal

Rekomendasi

Selanjutnya strategi prioritas terpilih yang sebaiknya diterapkan dalam pengembangan program HKM di Desa Leboni adalah Mengembangkan status KTH menjadi badan usaha bisnis

Posisi Kelompok Tani Hutan berada pada kondisi progresif atau memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kinerja

organisasi. Oleh karena itu, penyusunan program kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang harus berdasarkan pada strategi prioritas terpilih yaitu mengembangkan status KTH menjadi badan usaha bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. Hj. Wardah, M.FSc sebagai Pembimbing I dan Dr. Ir. Muhardi, M.P sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, petunjuk dan arahan dari awal sampai selesainya karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, Gutomo Bayu, Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansha Abdulrahim, Temi Indriati Miranda. 2010. *Strategi pengurangan Kemiskinan Di Desa-desa Sekitar Hutan (Pengembangan Model PHBM dan HKM)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI.
- Damayanti, Prawesty Tunggul. 2011. "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber-Daya Hutan Bersama Masyarakat". *Jurnal Komunitas* (1) : 70-82
- Hardiatmi, J. M. S. 2008. "Kontribusi Agroforestry Dalam Menyelamatkan Hutan Dan Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Inovasi Pertanian* Vol. 7, No. 1, 2008 (26- 32).
- Hakim, Ismatul, Setiasih Irawanti, Murniati Dan Sumarhani, Asmanah Widiarti, Rachman Effendi, Mohammad Muslich Dan Sri Rulliaty, 2010. *Social forestry : Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Pusat penelitian dan pengembangan

- Perubahan iklim dan kebijakan, Kementerian kehutanan
- Limberg, Godwin, Ramses Iwan, Eva Wollenberg, Moira Moeliono. 2006. *Peluang dan Tantangan untuk Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan: Pengalaman dari Malinau*. Center for International Forestry Research. Program Forests dan Governance
- Mulyoutami, E, Endy Stefanus, Wim Schalenbourg, Subekti Rahayu, Laxman Joshi., *Pengetahuan Lokal Petani Dan Inovasi Ekologi Dalam Konservasi Dan Pengolahan Tanah Pada Pertanian Berbasis Kopi Di Sumberjaya, Lampung Barat*. Bogor: World Agroforestry Center (ICRAF).
- Murdiyanto, Eko. 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Kearifan Lokal: Suatu Konsep Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Prosiding Seminar Pendidikan Agroforestry Sebagai Strategi Menghadapi Pemanasan Global. Penyunting: Supriyono, Djoko Purnomo. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Sumargo, W, Oelthon Gussetya Nanggara, Isnenti Apriani, Martin Hardiono. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*. Forest Watch Indonesia.